



Perilaku Indisipliner Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang)

Anggun Biyanti, Stevany Afrizal, Meilla Dwi Nurmala*

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Ciwaru Raya No.25, Cipere, Kec. Serang, Kota Serang, 42117, Indonesia

*Correspondence: E-mail: Anggun.biyanti14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku indisipliner dalam protokol kesehatan pada masyarakat secara sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian yakni masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang. Adapun hasil penelitian ini faktor atau alasan masyarakat berperilaku indisipliner, yakni faktor ekonomi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan keberadaan Covid-19, faktor lingkungan, serta vaksinasi. Kemudian perilaku indisipliner dapat ditanggulangi jika struktur mampu menjalankan tugas dengan baik.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 05 Des 2021

First Revised 6 Jan 2022

Accepted 20 Feb 2022

First Available online 2 Mei 2022

Publication Date 02 Jun 2022

Kata Kunci:

Protokol Kesehatan,

Perilaku Indisipliner,

Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Kemunculan wabah virus corona berlangsung dan menyebar sangat cepat dengan waktu singkat dan berkelanjutan. WHO (World Health Organization) secara resmi mengumumkan virus corona sebagai pandemi terhitung sejak 9 Maret 2020. Coronavirus termasuk dalam keluarga besar virus yang menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan (Zendrato, 2020). Gejala umum Covid-19 berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak napas, serta jika terdapat orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita Covid-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya (<https://www.kemkes.go.id/> diambil pada 11 Maret 2022). Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibiarkan berlanjut. Semua pihak, termasuk pesantren, harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi semua siswa. Tindakan pembatasan dan penurunan aktivitas ekonomi yang terkait dengan pandemi telah berdampak pada sektor ekonomi secara global. Banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan, pengangguran meningkat, dan pasar keuangan mengalami fluktuasi. Sekolah-sekolah, universitas, dan banyak kegiatan sosial harus ditangguhkan atau beralih ke pembelajaran jarak jauh, serta interaksi virtual. Pandemi ini juga dapat mengakibatkan isolasi sosial dan dampak pada kesejahteraan mental.

Pemerintah Indonesia merilis berbagai aturan untuk menekan angka persebaran Covid-19 diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Pramono dan Raharjo, 2020). Kebijakan PSBB meliputi peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, serta pembatasan kegiatan pada fasilitas umum (Hardi dan Akbar, 2021). Pembatasan sosial menyebabkan tekanan yang tinggi pada masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pada segi sosial, masyarakat merasa terbatas kegiatannya, menjadi jenuh. Sedangkan segi ekonomi, kegiatan usaha rumah tangga tidak berjalan dengan baik, terdapat pengurangan tenaga kerja (Modjo, 2020). Langkah-langkah PSBB bertujuan untuk meredam penyebaran virus dengan mengurangi interaksi sosial dan membatasi mobilitas orang. Tujuannya adalah melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus yang dapat mengganggu sistem kesehatan dan infrastruktur publik. Langkah ini sering diambil sebagai respons atas situasi darurat kesehatan seperti pandemi. Dampak PSBB dapat bervariasi tergantung pada lamanya penerapan, tingkat kepatuhan masyarakat, dukungan pemerintah, dan situasi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan strategi yang seimbang untuk melindungi kesehatan masyarakat sambil juga meminimalkan dampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi.

Selanjutnya ada kebijakan New Normal, hidup berdampingan dengan Covid-19. New Normal adalah perubahan perilaku yang menjalankan aktivitas normal, namun dengan menambahkan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran atau penularan Covid-19. New Normal mengacu pada periode setelah fase akut dari suatu krisis atau perubahan besar di mana masyarakat dan ekonomi mulai beradaptasi dengan situasi baru yang mungkin berbeda dari kondisi sebelumnya. New Normal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi baru yang muncul setelah melewati perubahan atau krisis besar, seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan besar dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Istilah ini mengacu pada adaptasi masyarakat dan kebiasaan baru yang muncul sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Dalam konteks pandemi COVID-19,

New Normal merujuk pada perubahan dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi yang diterapkan sebagai tanggapan terhadap penyebaran virus. Ini melibatkan pengenalan kebiasaan baru, kebijakan, dan protokol kesehatan yang dirancang untuk menjaga keselamatan individu dan masyarakat sambil memungkinkan kegiatan sehari-hari dan aktivitas ekonomi berlangsung. Dalam konteks pandemi COVID-19, New Normal menggambarkan periode setelah puncak wabah di mana masyarakat perlu beradaptasi dengan kehidupan yang lebih terkontrol dengan adanya virus yang masih ada di lingkungan, sementara upaya pencegahan dan mitigasi terus dilakukan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kembali sektor perekonomian Indonesia, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa mencari nafkah, dan lainnya tanpa melupakan protokol kesehatan (Safitri dan Dewa, 2020). Penerapan protokol kesehatan tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Aminah dan Ratnawaty, 2020).

Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial. Menurut Soemardjan, perubahan sosial meliputi segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Cahyono, 2016). Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam struktur, norma, nilai-nilai, interaksi, dan institusi dalam masyarakat. Ini adalah proses di mana aspek-aspek sosial dari suatu kelompok atau masyarakat mengalami transformasi seiring waktu. Perubahan sosial dapat bersifat besar dan mencakup seperti perubahan dalam sistem ekonomi, teknologi, politik, atau budaya, atau dapat bersifat lebih kecil seperti perubahan dalam norma-norma sosial atau pola interaksi harian. Perubahan sosial bukanlah fenomena yang statis, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung. Hal ini dapat membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan pembangunan sosial, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan seperti konflik budaya, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial yang tidak diinginkan. Masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial umumnya lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi masyarakat menganggap bahwa terdapat inkonsisten dan ketidaktegasan pemerintah baik dari kebijakan maupun imbauan yang ditetapkan. Sehingga dapat memicu masalah kehidupan serta menyebabkan kekacauan. Dapat dilihat dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial secara cepat yang disebabkan pandemi Covid-19 serta keadaan dengan tatanan baru atau era New Normal. Pada era New Normal ini mengharuskan masyarakat menyesuaikan perilakunya pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, menjauhi kerumunan, serta menjaga jarak minimal 1 meter (Ahyar, 2020).

Ketidaksiapan masyarakat tersebut dapat dilihat dari penerapan protokol kesehatan, masih ada masyarakat yang lalai dalam pelaksanaannya. Kelalaian inilah yang menyebabkan angka Covid-19 di Indonesia masih bertambah tiap harinya. Terlihat dari update terakhir 11 Maret 2022 menunjukkan angka positif di Indonesia sekitar 5.864.010, dan 151.703 angka meninggal dunia (<https://covid19.go.id/> diambil pada 11 Maret 2022). Pelanggaran yang ditemukan seperti tidak memakai masker saat berpergian, berkerumun tanpa menjaga jarak, serta masih ada fasilitas umum (taman bermain, tempat wisata, dan lain-lain) yang tidak menyediakan keran untuk mencuci tangan, dan lain-lain. Bahkan tak jarang ditemui pesta-pesta perkawinan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

Perilaku indisipliner protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat tentu disebabkan oleh berbagai faktor.

Perilaku indisipliner protokol kesehatan juga dapat ditemukan pada lokasi penelitian yakni pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang. Peneliti menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gelam Jaya dalam penerapan protokol kesehatan di antaranya: tidak memakai masker saat berpergian keluar rumah; memakai masker hanya sebatas mulut (tidak menutupi hidung); tidak menerapkan jaga jarak minimal 1 meter; berkumpul-kumpul dengan para tetangga; mengadakan pesta seperti resepsi pernikahan, khitanan anak laki-laki, pesta ulangtahun, dan lain-lain tanpa menerapkan protokol kesehatan 3 M (Memakai masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga jarak); tidak tersedianya tempat cuci tangan pada fasilitas umum; dan lain sebagainya.

Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana perilaku indisipliner protokol Kesehatan pandemi Covid-19 pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang dari sisi sosiologis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku indisipliner protokol Kesehatan pandemi Covid-19 pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menggali makna, dan menganalisis fenomena sosial dalam kedalaman dan konteksnya alih-alih mengukur atau menghitung variabel-variabel seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan metode dan alat seperti wawancara, observasi, analisis teks, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kompleks. Penelitian kualitatif memiliki kelebihan dalam menjelajahi aspek-aspek kompleks dari fenomena manusia dan sosial. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, variabilitas, dan kerumitan dari pengalaman manusia. Karena pada penelitian ini, peneliti ingin menjabarkan hasil penelitian secara naratif dan mendeskripsikan secara rinci tentang masalah yang diteliti (Yuliani, 2018). Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut diperlukan agar peneliti dapat memperoleh hasil-hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti selaku instrument juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini, yaitu purposive sampling, peneliti memilih informan dengan kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, maksudnya ialah membandingkan informasi satu topik yang sama dari informan dengan posisi yang berbeda dari sumber data ke sumber data lainnya, hingga peneliti mendapatkan data jenuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perilaku indisipliner protokol kesehatan pandemi covid-19 pada masyarakat kelurahan gelam jaya, kabupaten tangerang

Hasil dan pembahasan dapat disajikan menggunakan sub judul sesuai kebutuhan. Hasil dan pembahasan berisikan data yang dikumpulkan selama proses penelitian serta analisis dari data tersebut. Setiap argumen harus dikaitkan dengan kajian pustaka pada bagian pendahuluan. Bagian ini tidak berisikan kutipan dari sumber-sumber lain. Bagian ini hanya berisikan analisis penelitian dan pendapat peneliti terhadap hasil penelitian.

Penerapan protokol Kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain atau menghindari kerumunan sudah seharusnya dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun realitasnya, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat/warga mematuhi peraturan tersebut. Beberapa bentuk perilaku indisipliner yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang antara lain: tidak menggunakan masker, menggunakan masker dengan cara yang tidak baik dan benar, serta beraktifitas atau berkumpul tanpa menjaga jarak seperti pada saat kegiatan pesta pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian, peneliti menemukan beberapa alasan atau penyebab masyarakat melanggar penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 di antaranya, yakni:

(i) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat berperilaku indisipliner dalam penerapan protokol kesehatan. Masyarakat yang bekerja hanya sebagai juru parkir, dan pedagang asongan memiliki perekonomian yang sulit di masa pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penjual sayur-sayuran Ibu S (50 tahun).

“Alasan saya tidak memakai masker karena nda punya uang, wong makan aja susah gimana mau beli masker”. (Hasil wawancara pada 29 Maret 2022).

Selain itu, keberadaan masker, handsani- tizer yang sempat langka dan mahal juga menjadi alasan masyarakat berbagai lapisan, baik itu lapisan atas, maupun bawah enggan menggunakan masker hal ini terlihat pada hasil wawancara dengan ibu TE (30 tahun) karyawan di suatu perusahaan yang memiliki pemasukan stabil selama pandemi Covid-19 menyebutkan:

“Saya tidak pakai masker males lah, masker mahal terus kadang ada, kadang tidak. Sekalinya ada, eh dibatesin pembeliannya, toh banyak juga yang tidak pake masker”. (Hasil wawancara pada 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya faktor ekonomi ini tidak dapat terlepas dari berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat pelanggar dalam menerapkan protokol disebabkan oleh faktor ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam membeli alat pelindung diri. Padahal, salah satu informan memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau penjual sayur-sayuran di pasar terbuka, di mana setiap harinya bertemu dan berinteraksi dengan berbagai orang seperti para pembeli, sesama pedagang, dan lain-lain. Pedagang di pasar ini lebih rentan untuk terinfeksi virus Covid-19 jika abai dalam penerapan protokol kesehatan.

(ii) Ketidakpercayaan terhadap Covid-19

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan keberadaan Covid-19 menjadi penyebab selanjutnya masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak R (35 tahun) seorang pedagang bakso keliling.

“Saya tidak percaya corona ada, saya juga tidak vaksin. Jika ada razia ya saya tinggal mutar balik berganti jalan. Tapi pernah diberhentikan satpol PP karena tidak pake masker mbak, tapi ya gitu doang tidak kena hukuman atau denda. Terus setiap saya pulang kampung tidak ada itu, pemeriksaan vaksin seperti yang di televisi bilang. Ya pake masker kalau mau berobat ke puskesmas saja”. (Hasil wawancara pada 29 Maret 2022).

Ketidakpercayaan tentang Covid-19 berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih minim, sehingga tak sedikit masyarakat Kelurahan Gelam Jaya percaya dengan banyaknya berita-berita bohong yang beredar di sosial media yang menyebutkan Covid-19 tersebut tidak ada, itu pengalihan isu politik dan lain sebagainya, tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait berita yang beredar tersebut. Pemangku kebijakan atau pemerintah sendiri telah mencoba membuat kebijakan terbaik untuk pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19 yang menimpa Indonesia. Namun masih belum tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan protokol kesehatan di berbagai tempat, jika melanggar akan dikenakan sanksi. Realitasnya sanksi tersebut tidak ada, petugas hanya melakukan razia masker tanpa memberikan sanksi yang berarti bagi masyarakat. Selain itu, tidak adanya kejadian penderita Covid-19 di lingkungan sekitar menambah alasan pendukung yang membuat masyarakat semakin percaya jika tidak ada Covid-19, seperti yang ditampilkan di berita televisi.

(iii) Faktor lingkungan

Faktor selanjutnya penyebab masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan adalah faktor lingkungan. Faktor ini memberi pengaruh dalam membentuk perilaku masyarakat termasuk dalam menaati protokol kesehatan. Faktor lingkungan yang menampilkan penerapan protokol kesehatan yang benar dan sesuai, tentu membuat masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan seperti di pusat perbelanjaan, puskesmas, sekolah, dan lain-lain yang mana melakukan sosialisasi, penyediaan fasilitas, dan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal ini terbukti dengan penjelasan seorang anak berinisial R siswa kelas 6 SD, dia menuturkan bahwa:

“Aku ndak pake masker yak karena lagi ga sekolah lah, ngga ada bu guru yang bisa marahin. Lagian, temen-temen juga pada ngga pake masker. Tapi iya aku takut sama covid-19 kan banyak yang meninggal kan kak karna Covid”. (Hasil wawancara 29 Maret 2022).

Alasan tersebut juga ditemukan pada hasil wawancara dengan Bu N (29 tahun) seorang Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

“Saya memakai masker kalau mau pergi ke jauh saja, kayak ke mall atau jalan-jalan ke kota yang banyak polisi. Kan polisi sekarang mah kadang suka ngerazia, kadang engga razia. Namanya hari apes nggak ada yang tau mbak, jadi ya pakai masker kalau mau pergi ke tempat yang jauh banget dari rumah, kalau masih di satu kecamatan mah ngga pernah make, soalnya engap terus irit masker terus saya juga ga percaya covid ada tuh. Yah, walaupun ada yang bilang tetangga saya yang meninggal karena covid karena gejalanya sesek napas gitu mbak, tapi saya mah biasa aja sih. Saya juga masih suka ngumpul-ngumpul bareng tetangga, buktinya saya masih hidup sehat walafiat” (Hasil wawancara pada 29 Maret 2022).

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwasanya masyarakat bersifat dinamis dan cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam artian jika individu atau masyarakat berada di lingkungan yang penerapan protokol kesehatannya tinggi atau ketat maka individu tersebut mau menerapkan protokol kesehatannya. Sebaliknya, jika tidak ada

pengawas dari lingkungan sekitar seperti penanggung jawab petugas Satgas Covid-19 maka individu atau masyarakat cenderung melakukan pelanggaran dengan tidak menerapkan protokol kesehatan.

(iv) Vaksinisasi

Pengembangan vaksin yang aman dan efektif terus dilakukan sebagai salah satu langkah dalam menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran virus Covid-19. Namun kenyataannya, tidak bisa dipungkiri masih ditemukan kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi. Pada program vaksinasi terdapat dua kubu, yakni pro artinya menerima vaksin, dan kontra menolak vaksinasi.

Penolakan pada vaksinasi masih dapat ditemukan pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, seperti pada wawancara dengan Pak R (35 tahun) seorang penjual bakso dan Ibu N (29 tahun) seorang Ibu Rumah Tangga. Kedua informan mengungkapkan bahwa mereka tidak mau untuk di vaksinasi, karena keduanya tidak percaya adanya Covid-19, selain itu Pak R mengatakan “saya tidak mau vaksin, saya takut kalau divaksin nanti demam, malah bikin sakit kayak yang diberitakan di televisi” (hasil wawancara pada 29 Maret 2022).

Pada sisi masyarakat yang menerima vaksin sebetulnya mereka vaksin karena paksaan keadaan. Sebagaimana wawancara dengan Ibu EP (30 Tahun) seorang karyawan di suatu pabrik, mengungkapkan bahwa “Saya vaksin ya karena disuruh pabrik, kalau ga vaksin saya ga boleh masuk kerja” (hasil wawancara pada 09 April 2022).

Jika dilihat dari sisi kontra, masyarakat enggan vaksin karena kemauan dirinya sendiri yang takut dengan efek vaksin, serta tidak percaya adanya Covid-19. Sedangkan, dari sisi masyarakat yang pro, mereka vaksin karena terpaksa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perilaku individu-sipliner protokol kesehatan dengan faktor vaksinasi ini adalah di mana masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan karena pada masyarakat yang sudah vaksin, mereka merasa sudah kebal akan adanya Covid-19 sehingga mulai kendor dalam penerapan protokol kesehatan. Sedangkan pada masyarakat yang tidak mau vaksin dan tidak menerapkan protokol kesehatan dikarenakan memang dari awal keberadaan Covid-19 masyarakat tersebut tidak percaya virus Covid-19 ini. Sejalan dengan penelitian Ganafi dkk (2021), mengatakan bahwa kedua kubu yang menolak dan menerima vaksinasi ini telah menjadi konflik laten dalam masyarakat. Konflik laten ini terjadi di suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menghasilkan konflik, tetapi belum disadari oleh pihak yang terlibat. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi konflik manifes (terbuka) di masyarakat. Untuk saat ini konflik dapat dihindari dengan saling menghormati keputusan serta pendapat orang lain, tidak termakan hoax seputar vaksinasi.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perilaku indisipliner protokol kesehatan pada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang di atas, jika dikaitkan dengan teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam bukunya “The Social System” yang terbit tahun 1951 bahwa tindakan sosial atau individu dipengaruhi oleh struktur dan budaya. Dalam pendekatan teori AGIL peneliti menganggap bahwa pelanggaran penerapan protokol kesehatan salah satu ketidaksiapan masyarakat dari adanya perubahan sosial yang timbul sejak masa pandemi Covid-19, yang mana menyebabkan disfungsi dalam suatu organ, dan suatu disfungsi harus diatasi dengan baik oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Dalam teori tersebut dijelaskan bahwasanya suatu sistem memiliki struktur selengkap organ tubuh, apabila disfungsi pada suatu organ tidak dapat diatasi dengan baik maka akan mempengaruhi fungsi lainnya, bahkan terjadi disintegrasi pada seluruh sistem sosial tersebut. Dalam hal ini jika pelanggaran penerapan protokol kesehatan tidak diatasi dengan baik akan

mengacaukan kehidupan sosial yang lainnya di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sehingga jika ingin peran dan fungsi dalam suatu sistem sosial dapat berjalan harus adanya kerjasama yang baik antar anggotanya.

Talcott Parsons menjelaskan bahwa sebuah sistem sosial itu memiliki “kebutuhan” (needs) atau masalah yang harus diatasi agar bisa bertahan, yakni dengan cara adaptasi (adaptation, institusi ekonomi), pencapaian tujuan (goal attainment, institusi politik), integrasi (integration, institusi hukum), serta pemeliharaan pola yang ada dan pengelolaan pertentangan/konflik (latent pattern maintenance, institusi pendidikan) yang biasa disingkat menjadi AGIL. Untuk setiap kebutuhan sistem sosial tersebut, ada institusi atau struktur yang berfungsi untuk memenuhinya yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Institusi ekonomi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan adaptasi (adaptation). Artinya jika sistem sosial (masyarakat) dipenuhi kebutuhan ekonominya, maka sistem sosial akan mampu beradaptasi. Institusi ekonomi (adaptation) merupakan fondasi utama bagi terbentuknya institusi lainnya. Masyarakat yang bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik atau mampu beradaptasi dengan perubahan kebiasaan di masa pandemi Covid-19, dikarenakan masyarakat tersebut mampu secara ekonomi untuk membeli alat pelindung diri.

Berbeda dengan yang ditemukan pada masyarakat yang diteliti peneliti. Masih ditemukan masyarakat Kelurahan Gelam Jaya berperilaku indisipliner penerapan protokol kesehatan, dikarenakan faktor ekonomi. Perekonomian yang sulit menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit beradaptasi dengan kehidupan di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat hidup berdampingan dengan virus, dan memperhatikan protokol kesehatan. Perekonomian yang sulit menjadikan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, dalam artian mereka enggan membeli alat pelindung diri, karena lebih penting membeli kebutuhan pokok sehari-harinya.

Kedua, Institusi politik berfungsi untuk memenuhi pencapaian tujuan (goal attainment). Institusi politik ataupun pemerintah di masa pandemi Covid-19, harus mampu secara bersama-sama mensosialisasikan visi misi, serta tujuan yang dibangun bersama untuk memerangi virus Covid-19 yang saat ini menimpa, dengan menerapkan protokol kesehatan dan menggalakkan program vaksinasi diberbagai kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Gelam Jaya dalam penerapan protokol kesehatan kurang terlihat kesungguhannya di mata masyarakat, seperti denda yang dikenakan jika abai prokes. Hal ini membuat masyarakat juga tidak jera atau kapok karena mereka merasa kebijakan denda bagi pelanggar prokes hanya ancaman atau gertakan biasa dari pemerintah. Hal ini berarti pencapaian tujuan dalam hal ini mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan, yang ingin disampaikan lewat sosialisasi kepada masyarakat belum terealisasi dengan baik

Diharapkan pemerintah lebih bersungguh-sungguh mensosialisasikan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemic Covid-19, khususnya kepada masyarakat di daerah perdesaan, sehingga masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan mau divaksinasi, serta masyarakat terhindar dari berita-berita bohong (hoax) di sosial media. Berita bohong tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mensosialisasikan seberapa bahayanya virus Covid-19.

Ketiga, Institusi hukum berfungsi memenuhi kebutuhan integrasi (integration). Artinya Institusi hukum atau struktur di masa pandemi Covid-19, harus mampu memperlihatkan dan menerapkan hukum yang tegas dan jelas pada sistem sosial. Berkaitan dengan penerapan

protokol kesehatan, struktur pemerintah harus jelas mengatur hukuman atau punishment bagi pelanggar protokol kesehatan. Karena jika dilihat berdasarkan faktor atau alasan masyarakat berperilaku indisipliner karena faktor lingkungan, di mana kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah atau aparat sipil maupun Satgas Covid-19 terhadap penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Keempat, Institusi pendidikan dan agama berfungsi untuk memenuhi pemeliharaan pola dan pengelolaan pertentangan/konflik (latency). Institusi pendidikan dan agama diperlukan sebagai sebuah proses sosialisasi lintas generasi sehingga menjadi suatu kebudayaan dan diikuti oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lebih lama. Artinya jika dikaitkan dengan masa pandemi Covid-19, di mana penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran virus, sudah seharusnya struktur melakukan pemeliharaan pola dan mengatasi pertentangan/konflik dalam hal ini pelanggar penerapan protokol kesehatan yang masih dilakukan masyarakat. Dengan demikian, pola yang sudah berjalan dengan seharusnya tidak terganggu dengan pertentangan/konflik tersebut di sistem sosial.

4. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan hidup manusia tanpa terkecuali. Penerapan protokol kesehatan saat ini masih menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19. Namun, realitasnya penerapan protokol kesehatan masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak beberapa pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, memakai masker tidak sesuai, tidak membawa handsanitizer atau tidak mencuci tangan saat memasuki suatu fasilitas umum, tidak menjaga jarak atau berkerumunan. Perilaku indisipliner merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma, aturan, atau tata tertib yang telah ditetapkan dalam suatu kelompok, institusi, atau masyarakat. Indisiplin bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, sekolah, lingkungan sosial, dan masyarakat umum. Perilaku indisipliner dapat memiliki konsekuensi negatif, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, institusi atau kelompok akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perilaku indisipliner, seperti memberikan sanksi, teguran, atau tindakan korektif lainnya. Ini melibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan atau norma yang berlaku, yang dapat menyebabkan gangguan, konflik, atau dampak negatif lainnya. Adapun faktor atau alasan masyarakat berperilaku indisipliner atau tidak disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan yaitu: faktor ekonomi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keberadaan Covid-19, faktor lingkungan, serta faktor vaksinasi. Perilaku-perilaku seperti ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan memperbesar risiko penyebaran virus. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan dalam mengikuti protokol kesehatan, serta memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang bahaya virus dan dampaknya. Otoritas kesehatan dan pemerintah seringkali memberlakukan sanksi atau tindakan tegas terhadap perilaku indisipliner demi melindungi kesehatan publik.

Perilaku indisipliner dapat ditanggulangi jika struktur mampu menjalankan tugas dengan baik. Talcott Parsons menjelaskan bahwa sebuah sistem sosial itu memiliki "kebutuhan" (needs) atau masalah yang harus dipenuhi/diatasi agar bisa bertahan, yakni problem yang harus dipenuhi/diatasi agar bisa bertahan. Adapun cara agar sistem sosial dapat bertahan, yakni dengan cara adaptasi (adaptation) atau institusi ekonomi, pencapaian tujuan (goal attainment) atau institusi politik, integrasi (integration) atau institusi hukum, serta pemeliharaan pola yang ada dan pengelolaan pertentangan/konflik (latent pattern

maintenance) atau institusi pendidikan dan agama yang biasa disingkat menjadi AGIL. Dalam perspektif ini, maka perilaku atau tindakan manusia dipandang lebih ditentukan oleh struktur-struktur sosial tersebut. Dengan kata lain, struktur yang “mempengaruhi atau menentukan” tindakan individu (aktor).

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya virus Covid-19 ini merupakan virus yang mampu bermutasi dengan cepat, dan mampu menyebar dengan cepat pula. Jadi sudah seharusnya kita waspada dengan virus Covid-19 ini di mana pun, dan kapan pun. Maka dari itu sudah seharusnya masyarakat mampu menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai warga negara di masa pandemi Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian untuk pemerintah, sudah seharusnya berkewajiban untuk selalu membina dan membuat kebijakan bagi masyarakat atau warga negaranya dengan baik dan benar, sehingga tidak ada pertentangan/konflik yang terjadi pada warga negaranya. Apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak warga negara yang perlu dipimpin dengan pemimpin yang bertanggungjawab bagi kelangsungan bangsa dan negaranya. Dengan adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemangku kebijakan atau pemerintah dengan masyarakat atau warga negara, Indonesia mampu bertahan (survive) di tengah pandemi Covid-19 yang masih menimpa negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pandemi ini dinyatakan berakhir.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, M. (2020). Problematika pendidikan berbasis masyarakat dan solusinya di era new normal Covid-19. *El_Huda*, IAI Qomarul Huda Bagu NTB, 11(2), 1-15.
- Aminah, S., & Ratnawaty, L. (2020). Pemberdayaan masyarakat Kampung Sarimulya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam pencegahan Covid 19. *Yustisi*, 7(2), 68-73.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Ganafi, F. S., & Afrizal, S. (2021). Prespektif konflik pada masyarakat dalam pelaksanaan vaksin Covid 19 di Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal. *EDISI*, 3(1), 120-129.
- Hardi, R. T., & Akbar, R. (2021). Pengaruh pandemi covid-19 terhadap karakteristik sampah padat pada kawasan Summarecon Serpong. *Jurnal Teknologi dan Desain*, 2(2), 94-103.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103-116.
- Pramono, J., & Raharjo, F. S. (2020). Kebijakan taktis pemerintah daerah di Pulau Jawa dalam penanganan corona virus desiasse (covid)-19. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 57-69.
- Safitri, L. A., & Dewa, C. B. (2020). Analisa pengaruh masa new normal pada penjualan online melalui e-commerce Shopee. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 22(2), 117-125.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Zendrato, W. (2020). Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19. *Jurnal Education and development*, 8(2), 242-242.